



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Jl. Jenderal A. Yani Kav-58 Bypass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Fax. 021-29079200 / PO.BOX 1148 JKT 13011 JAT

Jakarta, 4 Juli 2019

Nomor : 495/DJU.1/KU.01/7/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Set  
Hal : Permintaan data persiapan penyusunan Laporan Keuangan  
Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2019

Yth. 1. Para Sekretaris Pengadilan Tinggi  
2. Para Sekretaris Pengadilan Negeri  
Selaku Penanggung Jawab Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
Sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DIPA 005.03

Dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2019. Bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) DIPA 005.03 akan segera menyusun Laporan Keuangan Tingkat Eselon I. Berkenaan dengan hal tersebut dimohon agar Koordinator Wilayah segera mengirimkan data sebagai berikut :

## 1. Data Keuangan

- a. *Back-up* SAIBA seluruh satuan kerja yang berada di wilayah masing-masing;
- b. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan per satuan kerja, tingkat wilayah yang sudah ditandatangani dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf*;
- c. Rekapitulasi daftar Rekening Bank Bendahara Pengeluaran, Rekening Bendahara Penerimaan dan Rekening Lainnya/Biaya Proses Penyelesaian Perkara dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf* sesuai format terlampir ;
- d. Rekapitulasi daftar monitoring penutupan rekening bank Tahun 2019 yang sudah ditandatangani dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf* sesuai format terlampir;
- e. Memo penyesuaian per satuan kerja yang sudah ditandatangani dalam bentuk *softcopy* berupa *Pdf* ;
- f. Piutang PNBPN, beserta bukti pendukung dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf* ;

## 2. Data SIMAK BMN

- a. *Back-up* SIMAK-BMN dan Persediaan seluruh satuan kerja yang berada di wilayah masing-masing;
- b. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per Satuan Kerja dalam bentuk *softcopy* berupa *Pdf* ;

- c. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per Satuan Kerja dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf*;
- d. Register Transaksi Harian (RTH) dan data dukungnya dalam bentuk *softcopy* berupa *pdf* untuk transaksi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut;
  - Transfer masuk (102) dan Transfer keluar (302) s.d 30 Juni 2019;
  - Saldo awal (100) s.d 30 Juni 2019 per Satuan Kerja;
- e. Listing Data Barang Milik Negara Gabungan s.d 30 Juni 2019 per Satuan Kerja dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf*;
- f. BAST persediaan perlengkapan persidangan (register, buku jurnal, buku agenda, dll) dari Ditjen. Badilum ke Pengadilan Tinggi dan dari Pengadilan Tinggi ke Pengadilan Negeri dalam bentuk *softcopy* berupa *Pdf*;
- g. Satuan kerja dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2019 agar berpedoman pada Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya.

Untuk data keuangan point 1 (A s.d F) dikirim melalui email : [keuanganbadilum@gmail.com](mailto:keuanganbadilum@gmail.com) sedangkan data SIMAK-BMN point 2 (A s.d F) dikirim melalui email: [badilum.simakbmn@yahoo.com](mailto:badilum.simakbmn@yahoo.com) paling lambat kami terima tanggal 12 Juli tahun 2019.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 a.n DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM  
Sekretaris,  
  
DRS WAHYUDIN, M.Si.  
NIP. 19630509 198303 1 002

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN SATUAN KERJA PADA WILAYAH.....  
 PERIODE 30 JUNI 2019

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ES1	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TNP/NON TNP	SALDO REKENING BANK PER 30 JUNI 2019
1	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	005	03	GIRO							
2	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	005	03	GIRO							
3	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	005	03	GIRO							
4	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	005	03	GIRO							

MOHON DIISI SESUAI DENGAN FORMAT DAN LEBIH TELITI KARENA DIPAKAI REKONSILIASI DENGAN KEMENKEU PUSAT AGAR TIDAK DAPAT SURAT TEGURAN KALAU ADA KESALAHAN PENULISAN ANGKA DAN DATA PA SATKER DAN PN TIDAK DICAMPUR

DAFTAR REKENING LAINNYA SATUAN KERJA PADA WILAYAH.....  
PERIODE 30 JUNI 2019

NO	SATUAN KERJA	K/L	BA-ESI	JENIS REK	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	BANK	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TNP/NON TNP	SALDO REKENING BANK PER 30 JUNI 2019
1	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	005	03	GIRO							
2	PENGADILAN TINGGI JAKARTA	005	03	GIRO							

MOHON DIISI SESUAI DENGAN FORMAT DAN LEBIH TELITI KARENA DIPAKAI REKONSILIASI DENGAN KEMENKEU PUSAT AGAR TIDAK DAPAT SURAT TEGURAN KALAU ADA KESALAHAN PENULISAN ANGKA DAN DATA PA SATKER DAN PN TIDAK DICAMPUR

PENJELASAN: DIISI TNP APABILA REKENING TSB TIDAK ADA JASA GIRO ATAU BIAYA ADMINISTRASI





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO  
2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 PSW 5200 FAKSIMILE 021-3846402  
Website : [www.djpbjn.kemenkeu.go.id](http://www.djpbjn.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 625 /PB/2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian  
Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019

26 Juni 2019

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/  
Wakil Kepala/Direktur Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/  
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Lampiran I)

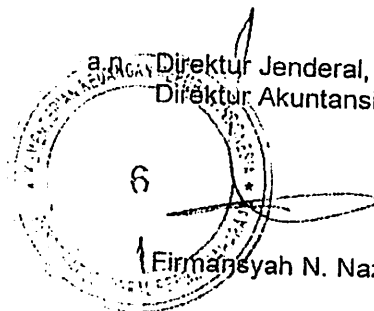
Sehubungan dengan proses rekonsiliasi, penyusunan, dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2019, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, diatur bahwa Laporan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2019 disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 31 Juli 2019.
2. Proses rekonsiliasi eksternal dalam rangka penyusunan LKKL Semester I Tahun 2019 dapat dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d. 18 Juli 2019 melalui Aplikasi e-Rekon&LK pada situs [www.e-rekon-lk.djpbjn.kemenkeu.go.id](http://www.e-rekon-lk.djpbjn.kemenkeu.go.id). Jadwal dan prosedur pelaksanaan rekonsiliasi bulan Juni 2019 disajikan dalam Lampiran II.
3. Penyusunan LKKL Semester I Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, dan Lampiran III surat ini.
4. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas LKKL diminta kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk:
  - a. Memastikan saldo akun-akun Neraca per 1 Januari 2019 sama dengan saldo Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited*.
  - b. Melakukan telaah atas laporan keuangan mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L.

- c. Mengimplementasikan penerapan, penilaian dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (lampiran IV).
  - d. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga akurasi LKKL.
5. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami harap Saudara menetapkan langkah-langkah yang dibutuhkan agar LKKL Semester I Tahun 2019 dapat disampaikan secara tepat waktu, akurat, andal, dan berkualitas.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



6  
Firman Syah N. Nazaroedin

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Karwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia;
3. Para Kepala KPPN seluruh Indonesia.

LAMPIRAN II  
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan  
Nomor: S-625/PB/2019  
Tanggal: 26 Juni 2019

DAFTAR SEKRETARIS JENDERAL/SEKRETARIS UTAMA/SEKRETARIS/  
KEPALAWAKIL KEPALA/DIREKTUR KEUANGAN/DEPUTI  
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

No.	Kementerian Negara/Lembaga
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	Dewan Perwakilan Rakyat
3.	Dewan Perwakilan Daerah
4.	Badan Pemeriksa Keuangan
5.	Mahkamah Agung
6.	Mahkamah Konstitusi
7.	Komisi Yudisial
8.	Kejaksaan Agung
9.	Kementerian Sekretariat Negara
10.	Kementerian Dalam Negeri
11.	Kementerian Luar Negeri
12.	Kementerian Pertahanan
13.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14.	Kementerian Keuangan
15.	Kementerian Pertanian
16.	Kementerian Perindustrian
17.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
18.	Kementerian Perhubungan
19.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Kementerian Kesehatan
21.	Kementerian Agama
22.	Kementerian Ketenagakerjaan
23.	Kementerian Sosial
24.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
25.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
26.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
28.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
30.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
31.	Kementerian Pariwisata

*R*